

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Greenpeace adalah organisasi internasional non pemerintah yang mengedepankan sikap damai serta kreatif dalam menyelesaikan masalah lingkungan global dan berusaha mengembangkan sebuah solusi demi terciptanya masa depan dunia yang hijau. Greenpeace memiliki capaian untuk memastikan bumi mampu memelihara segala keanekaragamannya. Sesuai dengan tujuan tersebut, Greenpeace mencoba untuk membantu suatu negara di Asia Timur yaitu Tiongkok dalam membantu menyelesaikan permasalahan polusi air yang hampir sebagian besar mencemari sungai. Munculnya permasalahan lingkungan di Tiongkok tidak terlepas dari adanya pembangunan negara serta pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi yang sukses dapat dilihat dari semakin banyaknya industri manufaktur yang muncul dan banyaknya lapangan kerja bagi masyarakat Tiongkok. Tiongkok sebagai negara yang besar harus memenuhi kebutuhan rakyatnya dimana mereka memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup. Dengan ini, Tiongkok tidak merasa ragu untuk menerima kerjasama perusahaan-perusahaan luar negeri yang ingin membuka cabang di Tiongkok. Salah satu industri yang banyak bekerjasama dengan Tiongkok ialah industri fashion. Tetapi bersamaan dengan perkembangan yang baik pada pembangunan negara, muncul suatu efek yang membawa dampak negatif pada sektor lingkungan.

Fenomena pencemaran lingkungan ini tidak terlepas dari perilaku ambisiusitas Tiongkok dalam menciptakan sebuah citra dimana Tiongkok ingin menciptakan semua pabrik untuk dunia dengan alih-alih

*made in China*. Strategi “*Made in China 2025*” memiliki tujuan dalam melepaskan ketergantungan Tiongkok terhadap teknologi asing. Salah satu strategi dalam industri fashion ialah yang dilakukan oleh istri presiden Xi Jinping, Peng Liyuan. Soft power yang dilakukan Peng Liyuan ialah dalam menampilkan gaya berbusananya yang menjadi pusat perhatian (Debora, 2017). Melalui strategi yang dilakukan Peng Liyuan ini membuat masyarakat Tiongkok semakin memperhatikan fashion dan lebih memilih menggunakan brand-brand terkemuka untuk menunjang penampilannya. Tidak hanya menggunakan produk yang berasal dari dalam negeri saja, masyarakat Tiongkok juga mulai menggunakan produk fashion dari luar negeri seperti brand pakaian H&M dan Zara. Namun melihat antusias masyarakat Tiongkok dan internasional mengenai bidang fashion membuat perusahaan yang bergerak di industri tekstil melakukan berbagai cara untuk memenuhi permintaan yang ada dan tidak jarang menimbulkan pro dan kontra.

Dari sekian banyak industri yang bekerja sama dengan Tiongkok, industri manufaktur khususnya pada sector tekstil menjadi salah satu industri yang menyumbang pencemaran air terbesar (Navarro, 2008). Industri tekstil yang kian banyak di Tiongkok tidak hanya membawa kebaikan bagi masyarakat tetapi juga membawa dampak buruk dimana industri ini belum cukup memiliki teknologi yang dapat mengendalikan limbah hasil dari produksi dengan baik. Industri ini masih memiliki sikap yang tidak baik dimana mereka melakukan pembuangan hasil produksi limbah mereka seperti bahan-bahan kimia yang berbahaya ke sungai yang ada di Tiongkok. Akibat tindakan tersebut, terjadi pencemaran lingkungan besar-besaran. Salah satu pencemaran lingkungan yang paling berbahaya ialah pencemaran air. Menurut Badan Kelautan Nasional China (SOA) “Daerah Pesisir Tiongkok telah terjadi fenomena pencemaran akut dengan jumlah kawasan mencapai lebih

50 persen pada tahun 2012. Wilayah laut seluas 68.000 kilometer persegi merupakan wilayah yang paling tercemar. 2012 mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dari tahun 2011 sekitar 24.000 kilometer persegi. Menurut SOA pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah polutan yang dibuang ke laut sekitar 17 juta ton” (Hardoko, 2013).

Adanya pencemaran air yang berada disepanjang pesisir Tiongkok, membuat masyarakat semakin resah. Aktivitas para penduduk pesisir yang sebagian besar memanfaatkan air dari aliran sungai menjadi terganggu. Kerusakan lingkungan tersebut tentunya membawa dampak lain bagi lingkungan serta masyarakat. Akibat hal tersebut membuat Greenpeace melakukan sebuah advokasi dalam menangani permasalahan kerusakan lingkungan tersebut. Tujuan diadakannya advokasi yang dilakukan Greenpeace ini ialah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan mengenai lingkungan agar pemerintah serta aktor yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan air ini dapat bekerja sama dengan baik dan melakukan upaya dalam pembersihan lingkungan sungai dan pesisir pantai di Tiongkok.

Berdasarkan fakta yang telah penulis jelaskan, penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh organisasi internasional Greenpeace dalam membantu mengurangi pencemaran air di Tiongkok. Penulis memilih Greenpeace karena organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dibidang lingkungan sudah lebih dari 49 tahun lamanya dan juga sudah memiliki banyak prestasi dalam melakukan berbagai aksi yang berkaitan dengan lingkungan di berbagai dunia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat dibuat ialah :  
Bagaimana strategi advokasi Greenpeace dalam menangani permasalahan polusi air di Tiongkok?

## **C. Kerangka Berpikir**

Untuk memahami bagaimana organisasi internasional melakukan advokasi terhadap suatu negara, penulis menggunakan konsep dan model yang dapat dijadikan pedoman untuk menganalisa bagaimana proses penyelesaian peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini, kerusakan lingkungan seperti polusi menjadi salah satu isu yang sering terjadi di negara industri sehingga membuat organisasi atau kelompok yang befokus pada kelestarian lingkungan mencoba untuk membantu menyelesaikan fenomena yang terjadi. Model Advokasi Segitiga Koordinasi dapat menjelaskan bagaimana strategi Greenpeace melakukan advokasinya.

### **1. Organisasi Internasional**

Organisasi internasional merupakan aktor non negara yang juga memiliki peranan penting dalam terciptanya hubungan internasional. Merujuk beberapa literatur kuno, organisasi internasional dibagi menjadi organisasi politik dan apolitis, yang pertama mengacu pada aliansi militer dan politik untuk memajukan kekuatan negara-negara anggota mereka dan yang terakhir mengacu pada organisasi yang hanya berurusan dengan masalah administrasi dan teknis. Namun, dalam abad ke 20 ini, organisasi internasional dibagi menjadi dua jenis yaitu organisasi internasional pemerintah atau *International Governmental Organizations* (IGOs) seperti PBB, Bank Dunia,

NATO dan juga IMF. Sedangkan jenis satunya lagi ialah organisasi internasional bukan pemerintah atau *International Non Governmental Organizations* (NGOs) seperti Greenpeace, Palang Merah Internasional dan Amnesty Internasional (*What are international organizations? - International Organization, t.t.*).

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai “sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai kepentingan bersama dari para anggotanya” (Archer, 2001). Definisi lain dari organisasi internasional menurut buku Administrasi & Organisasi Internasional ialah “suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda” (May, 2005). Greenpeace merupakan salah satu organisasi internasional yang mempunyai fungsi serta tujuan dalam melakukan aksinya dimana telah disepakati bersama oleh anggotanya sebagai aktor non negara yang fokus pada penanggulangan dan pelestarian lingkungan.

Greenpeace yang memiliki fokus pada lingkungan melakukan tugasnya dalam membantu masyarakat Tiongkok untuk membebaskan mereka dari belenggu pencemaran lingkungan yakni polusi air yang dapat menyulitkan serta membahayakan masyarakat sekitar lingkungan yang tercemar tersebut. Greenpeace berusaha membantu Tiongkok dalam menyelesaikan

permasalahan mereka dengan prinsipnya sebagai organisasi internasional.

## 2 Model Advokasi Segitiga Koordinasi

Advokasi menurut bahasa Inggris ialah *to advocate* yang berarti *to defend* (membela), selain itu advokasi juga diartikan ‘memajukan’ atau ‘mengemukakan’ (*to promote*), berusaha ‘menciptakan’ yang baru yang belum pernah ada (*to create*), atau dapat pula berarti melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis (*to change*) (Topatimasang, Fakhri, & Rahardjo, 2000). Dalam buku *Merubah Kebijakan Publik*, Advokasi menurut Roem Topatimasang, Mansour Fakhri, dan Toto Rahardjo (Roem Topatimasang dkk., 2000) ialah “sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perubahan tersebut.” Advokasi adalah sebuah proses yang di dalamnya terdapat sejumlah aktivitas yang ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. “*Advocacy is the pursuit of influencing outcomes — including public-policy and resource allocation decisions within political, economic, and social systems and institutions — that directly affect people’s current lives*” (Cohen dkk., 2001). Advokasi merupakan salah satu dari perangkat dan proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Advokasi memiliki tujuan dimana kebijakan publik mengalami perubahan yang dapat melindungi kepentingan masyarakat luas (Roem Topatimasang dkk., 2000).

Merujuk pada advokasi untuk mempengaruhi kebijakan publik, maka kebijakan publik sendiri dapat

didefinisikan sebagai “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Pengertian ini memberi batasan ruang lingkup kebijakan publik yang tidak hanya terbatas pada pernyataan-pernyataan yang merupakan keinginan pemerintah dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga meliputi hal yang tidak dilakukan pemerintah (Rizani, 2011). Kebijakan publik dapat diartikan dalam berbagai tindakan salah satunya peraturan perundang-undangan dan berupa program pembangunan atas respon dari masalah.

Kualitas aktor dalam melakukan advokasi tentu saja sangat berpengaruh terhadap proses serta hasil dari advokasi yang diajukan kepada pemerintah. Aktor-aktor yang akan melakukan advokasi diharapkan memiliki kemampuan dalam mengkomunikasikan ide dengan baik, melakukan pengorganisasian dan memiliki hubungan yang baik kepada target advokasi dan dapat membuat opini masyarakat yang mudah dipahami. Dalam melakukan advokasi, ada berbagai pihak yang terlibat demi tercapainya suatu tujuan, pihak tersebut yaitu (Nur Azizah, 2013) :



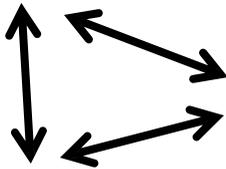
*Gambar 1 : Model Advokasi Segitiga Koordinasi*

Koordinasi antar aktor dalam melakukan advokasi sangatlah penting dalam rangka mewujudkan perubahan kebijakan publik agar sesuai kepentingan masyarakat luas. Setiap aktor yang satu dengan yang lainnya, mereka memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Pihak-pihak ini menjalankan tugasnya seperti aktor kerja basis dimana mereka harus membangun massa serta memobilisasi aksi yang dilakukan. Pada aktor kerja pendukung, mereka diharuskan untuk menyediakan semua data dan informasi demi terciptanya advokasi yang kuat. Lalu aktor yang bekerja pada garis depan, mereka terlibat langsung dalam proses legislasi advokasi dan menjadi salah satu aktor yang memiliki fungsi juru bicara dan sebagai perunding. Semua aktor-aktor ini saling berhubungan dan memiliki satu tujuan yang sama. Dalam mewujudkan terciptanya lingkungan yang bebas dari pencemaran lingkungan untuk masyarakat Tiongkok,

koordinasi antar aktor-aktor dapat digambarkan pada Model Advokasi Segitiga Koordinasi sebagai berikut :

### **KERJA PENDUKUNG**

Greenpeace mempublikasikan data / laporan global dari adanya pencemaran lingkungan di Tiongkok dengan judul “Dirty Laundry”.



### **KERJA BASIS**

Greenpeace melakukan kampanye dan bekerjasama dengan aktor target yaitu pelaku bisnis dan masyarakat internasional. Kampanye yang dilakukan Greenpeace bertajuk “Detox Campaign on Fashion” berhasil membangun basis massa yang kuat baik di Tiongkok maupun diluar negeri. Dengan adanya Detox Campaign on Fashion ini, Greenpeace meminta pelaku bisnis untuk berkomitmen pada tahun 2020 semua industri manufaktur dapat terbebas dari penggunaan bahan kimia berbahaya.

### **KERJA GARIS DEPAN**

Greenpeace memberikan tuntutan kepada pelaku bisnis dan pemerintah. Greenpeace menuntut agar pelaku bisnis dapat berkomitmen melakukan penghilangan bahan kimia berbahaya pada produknya dan menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan Sistem Manajemen Penggunaan Bahan Kimia serta menawarkan kepada pemerintah untuk bekerjasama dalam penghilangan semua bahan kimia berbahaya dengan mengadopsi komitmen politik “pembuangan nol” (*zero discharge*) pada semua bahan kimia berbahaya.

*Gambar 2 : Implementasi Advokasi Segitiga Koordinasi*

**Tabel Pemetaan Advokasi**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Advocacy Issue</b>	<b>Advocacy Goal</b>	<b>Advocacy Actors</b>	<b>Advocacy Target</b>	<b>Donor/ Funding</b>
<p>Terjadinya polusi air di sungai-sungai besar Tiongkok yang diakibatkan oleh adanya pembuangan limbah pabrik tekstil yang mengandung zat-zat berbahaya.</p>	<p>Mengubah kebijakan sistem manajemen penggunaan bahan kimia dan mengefektifkan kebijakan pengurangan dan penghapusan zat kimia berbahaya.</p>	<p>-Level Internasional : Greenpeace Internasional, Relawan, Blogger dan Model -Level Nasional : Greenpeace Tiongkok, Relawan, Blogger, Model</p>	<p>Pelaku Bisnis, pemerintah Tiongkok dan Masyarakat Internasional</p>	<p>-Greenpeace Fund - Individu - Foundations</p>

<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
<b>Achievment</b>	<b>Opponent/ Opposition</b>	<b>Barriers / Hambatan</b>	<b>Succes Story</b>
<p>Pemerintah Xintang mengadopsi kebijakan “Zero tolerance, full investigation” terhadap pencemaran industri tekstil setelah Greenpeace mengungkapkan pencemaran lingkungan yang parah di sekitar Xintang, sebuah kota pabrik tekstil yang memproduksi 60% jeans Tiongkok.</p>	<p>Pelaku bisnis yang kurang peduli dengan lingkungan</p>	<p>Sulitnya mempengaruhi pemerintah Tiongkok dalam mengadvokasi kebijakan pengendalian polusi air dan penggunaan bahan kimia berbahaya oleh industri tekstil.</p>	<p>Pada 2014, PM Li Keqiang menyisihkan 330 Miliar USD untuk mengatasi polusi air.</p> <p>Pemerintah mengeluarkan “Rencana Aksi Pencegahan dan Pengendalian Polusi Air”</p>

*Tabel 1 : Pemetaan Advokasi polusi air di Tiongkok*

Tabel pemetaan diatas menjelaskan bahwa Greenpeace sebagai subjek penelitian melakukan advokasi mengenai polusi air di Tiongkok yang merupakan akibat dari adanya pembuangan limbah hasil produksi industri tekstil yang mengandung zat-zat kimia berbahaya. Yang mana tujuan dari adanya advokasi ini adalah mengubah kebijakan pemerintah Tiongkok dalam manajemen penggunaan bahan kimia pada produk tekstil serta pengefektifan kebijakan pengurangan dan penghapusan zat kimia berbahaya. Greenpeace dalam melakukan advokasi dibantu oleh aktor-aktor lain baik dari level internasional dan nasional seperti relawan, blogger, selebriti, perancang busana dan juga model dengan target sasaran yaitu pelaku bisnis, pemerintah Tiongkok serta masyarakat internasional.

Dalam melakukan advokasi, Greenpeace memiliki lembaga donor sendiri yaitu Greenpeace Fund, selain itu organisasi ini menerima bantuan pendanaan dari *foundation*/yayasan donor dan individu. Strategi advokasi yang dilakukan Greenpeace kali ini adalah karena melihat dari kesuksesan yang telah dilakukan Greenpeace dalam mengungkapkan pencemaran lingkungan yang parah di sekitar Xintang yang akhirnya membuat pemerintah Xintang mengadopsi kebijakan “Zero tolerance, full investigation”. Dalam melaksanakan strategi advokasi untuk menangani permasalahan polusi air di Tiongkok, Greenpeace mengalami berbagai kesulitan atau kendala seperti sulitnya mempengaruhi pemerintah Tiongkok dalam mengadvokasi kebijakan pengendalian polusi air dan penggunaan bahan kimia berbahaya oleh industri tekstil. Terlepas dari hal tersebut, Greenpeace telah memiliki beberapa pencapaian sebagai wujud dari adanya advokasi ini, salah satunya yaitu Perdana

Menteri Li Keqiang menyisihkan 330 Miliar USD untuk mengatasi polusi air.

#### **D. Hipotesa**

Strategi advokasi Greenpeace untuk menangani permasalahan polusi air di Tiongkok ialah :

1. Greenpeace sebagai aktor kerja pendukung melakukan berbagai riset mengenai lingkungan yang ada disekitar industri tekstil.
2. Greenpeace sebagai aktor kerja basis yang memiliki jejaring luas diberbagai dunia, melakukan kampanye dan bekerjasama dengan aktor target yaitu pelaku bisnis dan masyarakat internasional.
3. Greenpeace sebagai aktor kerja garis depan melakukan lobby terhadap pemerintah Tiongkok dengan menyertakan bukti hasil riset serta menuntut agar pemerintah lebih mengefektifkan kebijakan pengurangan dan penghapusan zat kimia berbahaya, membuat kebijakan sistem manajemen penggunaan bahan kimia dan menawarkan kepada pemerintah untuk bekerjasama dalam penghilangan semua bahan kimia berbahaya dengan mengadopsi komitmen politik.

#### **E. Metodologi Penelitian**

##### **1. Tingkat Analisa**

Dalam penelitian ini, tingkat analisa dapat membantu menekankan cakupan pembahasan yang akan diteliti. Unit analisa atau *variable dependent* adalah strategi advokasi Greenpeace sedangkan unit eksplanasi atau *variable independent* dalam penelitian ini adalah sikap aktor-aktor yang berada di Tiongkok dalam menangani isu pencemaran lingkungan yakni

polusi air yang mana dampaknya akan mempengaruhi unit analisa yang akan diteliti.

## **2 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif-Kualitatif. Metode deskriptif menurut Nazir dalam buku Metode Penelitian (Sendari, 2019) ialah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan Metode Kualitatif adalah suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial yang merujuk pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk menggunakan kata-kata serta hasil analisa disusun secara rinci kedalam sebuah latar alamiah (Silalahi, 2009).

## **3 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan informasi serta data yang yang akurat, penulis menggunakan teknik penelitian studi pustaka serta media. Penelitian studi pustaka mengacu pada data-data yang berasal dari buku atau jurnal yang berkaitan dengan unit analisa serta memberikan penjelasan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan penelitian media merujuk pada media cetak ataupun surat kabar online yang menunjang hasil penelitian.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi penelitian agar tetap sesuai dengan masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai strategi advokasi Greenpeace dalam menangani

permasalahan polusi air di Tiongkok dimulai dari langkah Greenpeace dalam meneliti sungai-sungai di Tiongkok yang mengalami pencemaran akibat pembuangan limbah produksi dan respon pelaku bisnis dari adanya advokasi yang dilakukan. Sedangkan jangkauan waktu penelitian dimulai dari tahun 2011 hingga 2020.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis membagi tulisan menjadi 3 bab yaitu:

**BAB I** Bab ini memuat mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Berpikir, Hipotesa, Metodologi Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Menjelaskan organisasi internasional yaitu Greenpeace dalam keterlibatannya menangani pencemaran air di Tiongkok melalui strategi advokasi yang diusung. Pada bab ini juga akan dijelaskan hasil dari advokasi yang dilakukan Greenpeace terhadap aktor-aktor yang terlibat pencemaran air di Tiongkok.

**BAB III** Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.